

THE IMPACT OF FINANCIAL SECRECY ON CORRUPTION

JEAN STEVANY MATITAPUTTY

Universitas Kristen Satya Wacana, 52-60 Diponegoro Street, Salatiga, Indonesia
jean.matitaputty@uksw.edu

Received: September 24, 2025; Revised: December 8, 2025; Accepted: December 8, 2025

Abstract: Corruption poses a potential challenge to the economic growth and financial stability of a country. It is closely related to the regulation and legal system that governs various economic activities. This research aims to examine the influence of financial secrecy on corruption. Financial secrecy is supported by a country's legal system to conceal illegally obtained assets that can potentially cause corruption. The quantitative method with the panel data regression technique was used in this research. Financial secrecy was measured using the Financial Secrecy Index (FSI) and corruption was measured using the Corruption Perception Index (CPI). The total sample size was 302, originating from 118 countries worldwide, over three years (2018, 2020, and 2022). The results indicate that financial secrecy has a positive effect on corruption. Furthermore, this study provides more specific evidence through a robustness test, which shows that financial secrecy has a positive effect in developed countries and a negative effect in developing countries. Financial secrecy can be minimized if a country commits to information exchange to combat corruption, as applied by the G20 countries. This is supported by the result finding that financial secrecy has no effect on corruption in the G20 country category but has a positive effect in the non-G20 country category.

Keywords: Corruption, Financial Secrecy, Developed Country, Developing Country, G20, Non G20

Abstrak: Korupsi merupakan tantangan yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kestabilan keuangan negara. Korupsi berkaitan erat dengan regulasi dan sistem hukum yang mengatur berjalannya berbagai aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh financial secrecy terhadap korupsi. Financial secrecy didukung oleh sistem hukum suatu negara untuk menyembunyikan aset yang diperoleh secara ilegal dan berpotensi menyebabkan korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan teknik regresi data panel. Pengukuran financial secrecy menggunakan Financial Secrecy Index (FSI) dan korupsi menggunakan Corruption Perception Index (CPI) dengan total 302 sampel yang berasal dari 118 negara di dunia dalam 3 tahun pengamatan (2018, 2020, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial secrecy berpengaruh positif terhadap korupsi. Hasil penelitian ini secara lebih spesifik dijelaskan dengan robustness test yang memberikan bukti empiris bahwa financial secrecy berpengaruh positif di negara maju dan negatif di negara berkembang, serta financial secrecy dapat diminimalkan apabila negara memiliki komitmen tentang pertukaran informasi untuk memberantas korupsi seperti yang diberlakukan oleh negara G20 dan didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa financial secrecy tidak berpengaruh di kategori negara G20 tetapi berpengaruh positif di kategori negara non G20.

Kata kunci: Korupsi, Kerahasiaan keuangan, Negara Maju, Negara Berkembang, G20, NonG20

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan faktor utama yang menjelaskan keterbelakangan pembangunan suatu negara. [Kuipers & Verhey \(2023\)](#) mengatakan bahwa kegagalan pemerintah dalam mengatasi korupsi memberikan dampak pada lemahnya perkembangan ekonomi, buruknya pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, serta meningkatnya ketidakadilan dalam proses peradilan dan politik. Lebih lanjut, praktik korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang sulit untuk diatasi karena melibatkan campur tangan pemerintah seperti korupsi bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial di Indonesia, praktik suap dan pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia serta pencucian uang dan perampasan tanah yang dilakukan oleh former Jharkhand chief minister di India. [Diagana & Diagne \(2023\)](#) berpendapat bahwa aktivitas korupsi yang melibatkan lembaga pemerintah akan melemahkan respon pemerintah terhadap krisis dan keadaan darurat serta mengurangi kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Berdasarkan data *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2023 yang dirilis oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa hanya 28 dari 180 negara yang mengalami perbaikan tingkat korupsi selama dua belas tahun terakhir, dan 34 negara mengalami penurunan tingkat korupsi yang signifikan. Meskipun terdapat kemajuan di seluruh dunia dalam mengkriminalisasi korupsi dan membentuk lembaga-lembaga khusus untuk menanganinya, namun tingkat korupsi secara global masih bersifat stagnan. Sebagian besar negara gagal dalam menghentikan korupsi. Lebih dari 80 persen populasi masyarakat tinggal di negara-negara dengan skor CPI di bawah rata-rata global atau kurang dari 43. Sementara itu, 10 persen dari seluruh populasi penduduk tinggal di 25 negara dengan skor CPI tertinggi. CPI menggunakan skor 0-100. Nilai skor CPI yang mendekati 100

menunjukkan bahwa negara tersebut bersih atau bebas dari korupsi, sedangkan skor CPI yang mendekati 0 menunjukkan negara tersebut sangat korup. Dengan demikian, skor CPI rata-rata global sebesar 43 menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan global yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan banyak orang.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk menekan angka korupsi dengan memperkuat sistem peradilan dan reformasi hukum, membentuk lembaga-lembaga anti korupsi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik serta menjaga stabilitas politik. Kebijakan-kebijakan tersebut telah diimplementasikan dengan baik pada negara-negara dengan skor CPI tinggi atau negara yang dinilai “bersih” dan “bebas dari korupsi”. Akan tetapi, praktik korupsi seperti pencucian uang dan investasi ilegal masih terus terjadi di negara-negara tersebut karena adanya aktivitas transnasional. Sebagai contoh, pemerintah negara Belanda (CPI 79) yang menghadapi kritik karena memilih untuk tidak mengadili Eni & Shell Company dalam kasus suap minyak di Nigeria. Selain itu, beberapa pejabat pemerintah Namibia diadili karena diduga menerima suap dari perusahaan Islandia dalam kasus pertukaran kuota penangkapan ikan ilegal. Namun, pemerintah Islandia (CPI 72) selama empat tahun belum mengajukan tuntutan resmi untuk mengadili perusahaan tersebut. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa negara dengan skor CPI tinggi belum tentu bebas dari korupsi dan seringkali menjadi tempat tujuan dilakukannya pencucian uang dan investasi ilegal.

Penelitian [Janský et al. \(2023\)](#) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang berkaitan erat dengan perekonomian global dan mendorong terjadinya kasus korupsi dan tindakan kriminal keuangan yaitu adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan *financial secrecy*. [Upadhyay \(2024\)](#) mengatakan bahwa *financial secrecy* merupakan kebijakan yang bertujuan untuk membatasi pembagian

informasi keuangan kepada publik maupun lembaga yang sah seperti otoritas pajak dan penegak hukum. *Financial secrecy* umumnya diterapkan di negara-negara maju seperti yang dilakukan di Uni Eropa (UE). Terdapat keputusan pengadilan tinggi UE tahun 2022 yang membatalkan ketentuan mengenai keterbukaan informasi kepada publik dari rancangan undang-undang UE dan satu tahun setelah keputusan tersebut ditetapkan, analisis *Transparency International* menemukan bahwa akses terhadap informasi kepemilikan perusahaan sangat dibatasi bagi masyarakat sipil dan jurnalis di seluruh UE. Selain itu, Norwegia yang juga membatalkan rencana untuk membuat kebijakan pencatatan yang dapat diakses oleh publik serta Prancis yang sampai saat ini menyatakan bahwa hampir sepertiga dari perusahaan aktif di Prancis belum mendaftarkan kepemilikan perusahaannya termasuk kepemilikan asing perusahaan-perusahaan real estate dari Amerika Latin yang beroperasi di Prancis.

[Sharafutdinova & Lokshin \(2020\)](#) juga mengatakan bahwa untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka panjang, perusahaan memilih untuk berinvestasi pada negara yang menyediakan fasilitas kerahasiaan keuangan. *Secrecy jurisdictions* dianggap sebagai alat utama yang memungkinkan entitas untuk berlidung ketika melakukan praktik bisnis yang ilegal. Pendapat ini sejalan dengan [Cobham et al. \(2015\)](#) yang menjelaskan bahwa *financial secrecy* memberikan hambatan dalam penerimaan negara karena aturan yang dimiliki mendorong entitas dan individu untuk mengumpulkan dan menyembunyikan aset keuangan yang diperoleh dari aktivitas terlarang seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pencurian dana, penggunaan dana publik, penggelapan, pemerasan dan berbagai bentuk korupsi lainnya sehingga sulit untuk digugat oleh otoritas pajak maupun lembaga yang berwenang. Dengan demikian, kondisi ini memberikan gambaran bahwa tingkat *financial secrecy* yang tinggi diindikasikan dapat

meningkatkan praktik korupsi yang lebih dominan sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji apakah *financial secrecy* berpengaruh positif terhadap aktivitas korupsi ?. Penelitian ini juga dianalisis secara mendalam dengan melakukan pengujian *financial secrecy* terhadap korupsi di negara maju dan negara berkembang, kategori negara G20 dan non G20 serta dilengkapi dengan pengujian *financial secrecy* terhadap korupsi pada level benua.

Penggunaan negara maju dan negara berkembang didasarkan pada pandangan bahwa negara maju dan berkembang memiliki kondisi ekonomi dan produktivitas yang berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi kebijakan yang diterapkan pada negara tersebut. Negara berkembang memiliki kondisi ekonomi dan pembangunan yang tidak stabil serta sistem hukum yang lemah ([The World Bank 2020](#)). Karakteristik ini menyebabkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis dan aktivitas pemerintah sehingga memungkinkan individu dan entitas untuk terlibat dalam aktivitas yang bersifat ilegal. Sebaliknya, negara maju cenderung memiliki kondisi ekonomi yang stabil dan sistem hukum yang adil serta arah kebijakannya berfokus pada kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat sehingga diindikasikan dapat meminimalkan aktivitas ilegal seperti korupsi dan pencucian uang ([Trabelsi & Trabelsi 2021](#)). Dengan demikian, karakteristik negara maju dan negara berkembang diindikasikan memberikan penekanan yang berbeda pada pengaruh *financial secrecy* terhadap korupsi. Sementara itu, analisis yang berfokus pada kategori negara G20 dan Non G20 didasarkan pada adanya kesepakatan G20 yang mendorong keterbukaan informasi dan pertukaran informasi antar negara untuk kepentingan pajak. Kesepakatan ini mendorong negara-negara G20 untuk meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas publik sehingga diindikasikan tingkat *financial secrecy* pada negara-negara tersebut cenderung lebih rendah dan

dampaknya tidak signifikan terhadap korupsi jika dibandingkan dengan negara-negara non G20.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pemerintah untuk memitigasi potensi terjadinya korupsi melalui evaluasi aturan yang berkaitan dengan *financial secrecy* yang diterapkan oleh otoritas pajak, lembaga keuangan serta entitas bisnis yang memanfaatkan aturan tersebut untuk melaksanakan praktik bisnis yang ilegal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan kebaruan mengenai pengaruh *financial secrecy* terhadap korupsi khususnya pada negara maju dan negara berkembang serta negara G20 dan non G20 yang sebelumnya belum diteliti.

Financial Secrecy

Financial secrecy didefinisikan oleh [Tax Justice Network \(2024\)](#) sebagai penggunaan mekanisme keuangan yang kompleks oleh individual, perusahaan multinasional dan kriminal untuk menyembunyikan aset mereka dengan tujuan untuk menyalahgunakan pajak, melakukan pencucian uang, korupsi atau menghindari supremasi hukum. Negara dengan tingkat *financial secrecy* yang tinggi memiliki sistem hukum yang membantu individu dan entitas untuk menyembunyikan keuangan mereka. [Upadhyay \(2024\)](#) dan [Sukmadilaga et al. \(2020\)](#) mengatakan bahwa *financial secrecy* menyebabkan adanya batasan akses dan pembagian informasi keuangan dengan otoritas yang sah seperti otoritas pajak dan lembaga penegak hukum. *Financial Secrecy* umumnya diterapkan di Bank melalui undang-undang kerahasiaan bank yang melarang lembaga perbankan beserta pejabat dan karyawan untuk mengungkapkan data nasabah kepada pihak ketiga. [Hofmann \(2018\)](#) menambahkan bahwa terdapat hukum pidana yang berlaku bagi mereka yang melanggar kerahasiaan keuangan atau membagikan informasi keuangan kecuali jika diizinkan oleh klien atau untuk keperluan penyidikan yang memenuhi syarat berdasarkan

hukum yang berlaku. [Carr & Jago \(2014\)](#) dan [Nurjanah & Andri \(2015\)](#) juga menyatakan bahwa *financial secrecy* dipertahankan di Bank sebagai dasar untuk melindungi orang dari kerugian finansial di negara-negara yang tidak stabil, memiliki mata uang yang lemah, dan tingkat inflasi yang tidak terkendali. Selain itu, kebijakan *financial secrecy* juga dianggap memiliki tujuan untuk melindungi individu-individu yang kaya atau mereka yang mendukung tujuan politik tertentu untuk menyembunyikan aset mereka sehingga dapat menghindari ancaman penculikan atau penganiayaan.

Korupsi

[The World Bank \(2020\)](#) mendefinisikan korupsi sebagai bentuk penyalagunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi yang mencakup berbagai perilaku, mulai dari penyuaipan hingga pencurian dana publik. Definisi ini sejalan Lembaga [Transparency Internasional \(2024\)](#) yang menjelaskan korupsi sebagai penyalagunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi seperti pegawai negeri menuntut atau mengambil uang atau bantuan sebagai imbalan atas layanan yang diberikan, politisi menyalahgunakan uang publik atau memberikan pekerjaan maupun kontrak publik kepada sponsor, teman, keluarga atau pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan mereka, serta perusahaan yang menyuap pejabat untuk mendapatkan akses dan kesepakatan yang menguntungkan. Definisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya melibatkan birokrasi pemerintah dan politik tetapi juga sektor swasta. Disamping itu, penelitian [Maguchu \(2018\)](#) juga memberi penekanan bahwa korupsi yang paling mendasar yaitu penyalagunaan tugas sebagai pejabat publik. Korupsi umumnya terjadi di seluruh dunia terutama di negara-negara dengan institusi yang lemah. Korupsi memiliki dampak negatif yang dapat menurunkan kepercayaan publik, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi dan

memperburuk kondisi kesenjangan sosial, kemiskinan, dan krisis lingkungan hidup.

Pengembangan Hipotesis

Financial secrecy merupakan suatu aktivitas untuk menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan aset individu atau entitas yang diperoleh secara ilegal. *Financial secrecy* diterapkan pada lembaga keuangan khusus perbankan dimana Bank berjanji untuk merahasiakan informasi nasabahnya. Selain itu, *financial secrecy* juga didukung oleh sistem hukum yang mengizinkan pembentukan entitas seperti korporasi, yayasan, persekutuan yang kepemilikan, fungsi dan tujuannya dirahasiakan. [Tax Justice Network \(2020\)](#) menggambarkan informasi yang kerahasiaannya didukung oleh sistem hukum dilakukan khususnya pada rekening bank di negara Swiss, properti atau tempat tinggal di pusat kota London, kepemilikan pacuan kuda di Monaco, saham di perusahaan S&P 500 index, dan kepemilikan kapal pesiar. Sistem hukum yang diterapkan di negara-negara tersebut mempersulit pengungkapan informasi kepemilikan aset dan pendapatan. Disamping itu, *financial secrecy* juga bergantung pada sistem hukum suatu negara yang menghambat kerjasama dalam pertukaran informasi antar negara.

Financial secrecy mendorong berbagai aktivitas keuangan yang ilegal. Penelitian [Binhadab et al. \(2022\)](#) menjelaskan bahwa *financial secrecy* meningkatkan terjadinya praktik pemindahan keuntungan entitas dari negara tempatnya berproduksi ke negara lain untuk menghindari pembayaran pajak. Selain itu, Penelitian [Sharafutdinova & Lokshin \(2020\)](#) juga menyatakan bahwa pemegang aset di negara dengan kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil, sistem hukum yang lemah dan risiko pemindahtanganan aset yang tinggi menggunakan *secrecy jurisdictions* untuk melindungi aset mereka dari potensi pengungkapan. [Carr & Jago \(2014\)](#) juga mengatakan bahwa dana terlarang yang diperoleh melalui aktivitas korupsi dalam bentuk

suap seringkali masuk pada rekening pribadi dan ditransfer ke bank di negara lain yang sistem hukumnya mendukung penyembunyian informasi keuangan seperti yang dilakukan oleh kedua gubernur negara bagian Nigeria yang menerima suap dan menyimpan jutaan pound sterling di sejumlah bank terkenal di Inggris seperti Barclays, HSBC and RBS.

[Carr & Jago \(2014\)](#) menambahkan bahwa ketentuan mengenai *financial secrecy* bersifat melindungi dan mengistimewakan hubungan pihak bank dan klien karena pengungkapan informasi keuangan klien dianggap sebagai tindak pidana sehingga bank secara hukum memiliki batasan dalam pengungkapan informasi kepada pihak ketiga. Ketentuan *financial secrecy* menguntungkan bagi para pejabat yang melakukan korupsi karena mereka memiliki keinginan untuk menghapus asal-usul dana yang diperoleh secara tidak sah dan menggunakan berbagai mekanisme untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap dana yang diperoleh melalui aktivitas korupsi seringkali digunakan untuk investasi dalam bentuk aset berwujud seperti rumah, kendaraan maupun tanah. Proses investasi dalam bentuk aset berwujud tersebut dilakukan di negara lain sehingga tidak dapat dilacak ataupun diidentifikasi secara akurat. Sistem hukum di beberapa negara seperti Switzerland dan Lichtenstein juga memungkinkan untuk melakukan pencatatan kepemilikan aset menggunakan nama samaran atau anonim. Sistem ini mempersulit proses penyelidikan dalam kasus-kasus korupsi yang sering terjadi.

Penelitian [Christensen \(2012\)](#) menjelaskan bahwa fasilitas *financial secrecy* yang didukung oleh sistem hukum suatu negara pada dasarnya memberikan keuntungan bagi negara tersebut untuk memperoleh pendanaan dan investasi dalam jumlah yang besar. Fasilitas ini menyebabkan setiap individu, entitas maupun pejabat pemerintah yang melakukan tindakan kejahatan dan korupsi dalam bentuk penipuan, penggelapan, penghindaran pajak

dan suap untuk menyimpan perolehan asetnya di negara tersebut. Kebijakan hukum yang berpihak pada pelaku kejahatan tersebut mengindikasikan bahwa korupsi akan sulit untuk diatasi. Dengan demikian, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁: *Financial secrecy* berpengaruh positif terhadap korupsi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh *financial secrecy* terhadap korupsi dengan menggunakan data sekunder. Pengukuran *financial secrecy* menggunakan *Financial Secrecy Index* (FSI) yang dipublikasikan melalui *website Tax Justice Network*. Penilaian FSI dilakukan setiap dua tahun sekali dan selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2020 dan 2022, penilaian FSI dilakukan pada 141 negara di dunia. Nilai FSI menunjukkan seberapa besar keterlibatan sistem yuridiksi suatu negara dalam membantu individu, maupun entitas untuk menyembunyikan keuangan mereka. Nilai FSI menggunakan range 0 (*no secrecy*) sampai 100 (*full secrecy*). Sementara itu, korupsi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Corruption Perception Index* (CPI) yang dipublikasikan melalui *website Transparency International*. Penilaian CPI dilakukan pada 180 negara dan wilayah di seluruh dunia berdasarkan persepsi tingkat korupsi sektor publiknya dengan skala 0 (*highly corrupt*) sampai 100 (*very clean*).

Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel yang diolah menggunakan Eviews 10. Pengujian dilakukan dalam beberapa tahapan yang terdiri pengujian model menggunakan uji *chow*, uji *hausman* dan

uji *langrange multiplier* untuk mengetahui model mana yang paling tepat untuk digunakan antara *fixed effect model*, *random effect model* dan *common effect model*. Setelah penentuan model, selanjutnya dilakukan pengujian *financial secrecy* dan korupsi menggunakan seluruh data penelitian tahun 2018, 2020 dan 2022 yaitu sebanyak 302 data dari total 118 negara. Kemudian, dilakukan *robustness test* dengan mengelompokkan data berdasarkan negara maju dan negara berkembang serta negara yang masuk dalam kategori G20 dan non G20 serta dilengkapi dengan pengujian antar benua.

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data dengan menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1 yang menjelaskan bahwa *financial secrecy* memiliki nilai rata-rata sebesar 62.66 yang berarti bahwa tingkat *financial secrecy* 118 negara selama tahun 2018, 2020 dan 2022 masih tergolong sangat tinggi. Sementara itu, nilai minimal *financial secrecy* sebesar 35.88 berasal dari negara Slovenia dan nilai maksimal sebesar 88.58 berasal dari negara Vanuatu serta standar deviasi sebesar 10.41. Selain itu, korupsi memiliki nilai rata-rata 52.59 yang berarti bahwa tingkat korupsi secara global tergolong cukup tinggi. Sedangkan, nilai minimal korupsi sebesar 14.00 berasal dari Venezuela dan nilai maksimal sebesar 90.00 berasal dari Denmark. Venezuela menjadi negara terkorup berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini sementara Denmark merupakan negara dengan tingkat korupsi terendah atau negara yang bebas dari korupsi. Sementara itu, nilai standar deviasi variabel korupsi yaitu sebesar 18.02.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variables	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.
FSI	62.66	88.58	35.88	10.41
CPI	52.59	90.00	14.00	18.02
Developed				
FSI	56.01	80.35	35.88	8.35
CPI	64.35	90.00	29.00	15.62
Developing				
FSI	67.25	84.50	47.21	9.04
CPI	42.44	85.00	24.00	13.61
G20				
FSI	54.69	83.85	35.88	7.49
CPI	60.13	90.00	28.00	16.54
Non G20				
FSI	67.71	84.50	42.45	9.09
CPI	45.89	88.00	24.00	16.82

Keterangan:FSI : 0 (*no secrecy*) - 100 (*full secrecy*)CPI: 0 (*highly corrupt*) - 100 (*very clean*)

Sumber: data diolah

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa nilai rata-rata *financial secrecy* negara maju sebesar 56.01 lebih rendah dari negara berkembang yaitu sebesar 67.25. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di negara-negara berkembang masih memfasilitasi individu dan entitas untuk menyembunyikan keuangan yang dimiliki. Kondisi ini sejalan dengan nilai rata-rata korupsi negara maju sebesar 64.35 dan negara berkembang sebesar 42.44 yang menunjukkan bahwa negara maju memiliki tingkat korupsi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang. Hasil ini konsisten dengan kondisi negara G20 dan Non G20.

Nilai rata-rata *financial secrecy* di negara G20 adalah sebesar 54.69 lebih rendah dari negara non G20 yaitu sebesar 67.71. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem hukum negara non G20 lebih mendukung aktivitas penyembunyian aset jika dibandingkan dengan G20. Sejalan dengan itu, korupsi di negara non

G20 cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara G20. Nilai rata-rata korupsi negara non G20 sebesar 45.89 sedangkan G20 sebesar 60.13.

Uji Model Penelitian

Uji model dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange*. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan pilihan model yang tepat antara *fixed effect model*, *random effect model* dan *commen effect model*. Tabel 2 menunjukkan bahwa pilihan model utama untuk menguji pengaruh antara *financial secrecy* dan korupsi yaitu menggunakan *random effect model*. Sementara itu, pilihan model untuk pengujian *robustness test* dengan mengelompokkan data pada level negara maju dan negara berkembang serta negara yang masuk dalam kategori G20 dan Non G20 juga konsisten menggunakan *random effect model*.

Tabel 2. Uji Model

Full Model	Probabilitas		Model Sementara	Model Terpilih
Uji Chow	Cross-section Chi-square	0.000	Fixed Effect Model	
Uji Hausman	Cross-section random	0.053	Random Effect Model	Random Effect Model
Uji Lagrange multiplier	Cross-section Breusch-Pagan	0.000	Random Effect Model	
Developing	Probabilitas		Model Sementara	Model Terpilih
Uji Chow	Cross-section Chi-square	0.000	Fixed Effect Model	
Uji Hausman	Cross-section random	0.124	Random Effect Model	Random Effect Model
Uji Lagrange multiplier	Cross-section Breusch-Pagan	0.000	Random Effect Model	
Developed	Probabilitas		Model Sementara	Model Terpilih
Uji Chow	Cross-section Chi-square	0.000	Fixed Effect Model	
Uji Hausman	Cross-section random	0.473	Random Effect Model	Random Effect Model
Uji Lagrange multiplier	Cross-section Breusch-Pagan	0.000	Random Effect Model	
G20	Probabilitas		Model Sementara	Model Terpilih
Uji Chow	Cross-section Chi-square	0.000	Fixed Effect Model	
Uji Hausman	Cross-section random	0.696	Random Effect Model	Random Effect Model
Uji Lagrange multiplier	Cross-section Breusch-Pagan	0.000	Random Effect Model	
Non G20	Probabilitas		Model Sementara	Model Terpilih
Uji Chow	Cross-section Chi-square	0.000	Fixed Effect Model	
Uji Hausman	Cross-section random	0.672	Random Effect Model	Random Effect Model
Uji Lagrange multiplier	Cross-section Breusch-Pagan	0.000	Random Effect Model	

Sumber: data diolah

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi data panel yang disajikan pada Tabel 3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa FSI berpengaruh negatif terhadap CPI dengan nilai probabilitas $0.000 < 0,05$ dan nilai koefisien -0.470 . Hasil pengujian ini membuktikan bahwa financial secrecy berpengaruh positif terhadap korupsi yang berarti bahwa fasilitas kerahasiaan keuangan yang disediakan oleh suatu negara pada dasarnya mendorong peningkatan korupsi di negara tersebut sehingga H1 dalam penelitian ini diterima.

Hasil pengujian *Robustness Test* pada level negara maju menunjukkan bahwa FSI berpengaruh negatif terhadap CPI dengan nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai koefisien sebesar -0.538 . Hal ini menjelaskan bahwa negara-negara maju dengan kondisi perekonomian yang stabil juga memiliki sistem

Yuridiksi yang membantu individu maupun entitas melakukan menyembunyian aset yang diperoleh secara tidak sah dan mendorong terjadinya aktivitas korupsi. Disamping itu, hasil pengujian FSI terhadap CPI memiliki pengaruh positif di negara berkembang dengan nilai

probabilitas sebesar $0.035 < 0.05$ dan nilai koefisien sebesar 0.270. Pengaruh positif antara FSI dan CPI menunjukkan bahwa financial secrecy berpengaruh negatif terhadap korupsi dengan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.029. Nilai ini menunjukkan pengaruh yang lemah antara *financial secrecy* terhadap korupsi dan memberikan verifikasi bahwa 97.1% korupsi di negara berkembang dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi dapat terjadi meskipun sistem hukum negara berkembang tidak memfasilitasi *financial secrecy*.

Pengujian *robustness test* pada level negara G20 dan Non G20 juga menunjukkan hasil yang berbeda. Tabel 3 menunjukkan

bahwa FSI tidak memiliki pengaruh terhadap CPI dengan nilai probabilitas $0.328 < 0.05$ dan nilai koefisien sebesar -0.188 di kategori negara G20. Hasil ini menjelaskan bahwa financial secrecy tidak mendorong terjadinya korupsi di negara-negara G20 karena komitmen negara G20 telah mengacu pada OECD yang mendukung adanya pertukaran informasi untuk menekan terjadinya korupsi maupun aktivitas keuangan yang ilegal. Sementara itu, *financial secrecy* memiliki pengaruh yang positif terhadap korupsi di negara-negara non G20 yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas pengaruh FSI dan CPI sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai koefisien sebesar -0.542.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

<i>Variables</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>R-squared</i>	<i>Adjusted R-squared</i>	<i>Prob.</i>
FSI-CPI (<i>Full Model</i>)	-0.470	0.083	-5.657	0.096	0.096	0.000***
FSI-CPI (<i>Developing Countries</i>)	0.270	0.109	2.482	0.035	0.029	0.014**
FSI-CPI (<i>Developed Countries</i>)	-0.538	0.139	-3.873	0.105	0.098	0.000***
FSI-CPI (G20)	-0.188	0.191	-0.983	0.008	0.000	0.328
FSI-CPI (Non G20)	-0.542	0.142	-3.809	0.076	0.070	0.000***
FSI-CPI (Benua)						
Asia	0.334	0.240	1.395	0.027	0.012	0.168
Afrika	-0.593	0.237	-2.505	0.129	0.109	0.016**
Amerika Utara	0.110	0.217	0.507	0.006	-0.017	0.615
Amerika Selatan	-0.612	0.297	-2.057	0.150	0.115	0.051*
Eropa	-0.593	0.205	-2.892	0.074	0.066	0.005***
Australia	-1.211	0.288	-4.202	0.688	0.649	0.003***

Keterangan:

FSI : 0 (*No secrecy*) - 100 (*Full secrecy*)

CPI: 0 (*Highly corrupt*) - 100 (*Very clean*)

FSI : CPI (Negatif) = *Financial Secrecy : Corruption* (Positif)

FSI : CPI (Positif) = *Financial Secrecy : Corruption* (Negatif)

*** : Sig 1%

** : Sig 5%

* : 10%

Sumber: data diolah

Negara-negara non G20 tidak terikat pada perjanjian mengenai keterbukaan informasi sehingga sistem yuridiksi negara-negara tersebut berpotensi memfasilitasi penyembunyian keuangan yang dapat mendorong terjadinya korupsi.

Tabel 3 di atas juga memberikan gambaran secara lebih spesifik pada level negara. Hasil pengujian menunjukkan FSI berpengaruh negatif terhadap CPI dengan tingkat probabilitas sebesar 0.016 (Afrika), 0.051 (Amerika Selatan), 0.005 (Eropa) dan 0.003 (Australia). Disamping itu, FSI tidak berpengaruh terhadap CPI di Asia dengan tingkat probabilitas 0.168 dan 0.615 di Amerika Utara. Hasil ini memberikan gambaran bahwa Afrika, Amerika Selatan, Eropa dan Australia memiliki fasilitas *financial secrecy* yang berpotensi mendorong terjadinya peningkatan korupsi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *financial secrecy* berpengaruh positif terhadap korupsi sehingga hipotesis pertama yang dirumuskan dalam penelitian ini diterima. Sebagian besar negara berusaha untuk memperoleh pendanaan dengan cara menyediakan fasilitas perlindungan informasi keuangan bagi individu maupun entitas yang ingin menyimpan dana di negara tersebut. Fasilitas kerahasiaan keuangan umumnya digunakan oleh pihak yang memperoleh aset maupun sumber pendapatan secara ilegal melalui korupsi dalam bentuk suap, pencucian uang maupun penggelapan dana publik yang merugikan masyarakat. Aktivitas penyimpanan aset ilegal ini didukung oleh sistem hukum yang melarang pengungkapan daftar kepemilikan aset maupun asal-usul aset yang dimiliki oleh investor asing. Disamping itu, negara dengan tingkat *financial secrecy* yang tinggi memiliki regulasi yang ketat dan secara efektif melindungi investor asing dari penyelidikan dan penuntutan di negara asal mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan

pendapat [Yu \(2019\)](#) yang mengatakan bahwa *financial secrecy* mendorong terjadinya aktivitas korupsi, pencucian uang dan penggelapan pajak serta [Johannesen & Zucman \(2014\)](#) yang menyatakan bahwa individu khususnya pejabat publik yang melakukan korupsi dalam bentuk suap seringkali memiliki rekening bank di negara lain untuk menerima dana ilegal dari mitra bisnisnya. Selain itu, [Lord & Levi \(2017\)](#) juga menambahkan bahwa entitas bisnis yang memiliki hubungan politik dengan pejabat pemerintah untuk memperoleh kontrak tertentu menggunakan mekanisme *financial secrecy* untuk mentransfer sejumlah dana melalui rekening anonim maupun perusahaan cangkang sehingga tidak diketahui oleh publik. Lebih lanjut, [Binhadab et al. \(2022\)](#), [Christensen \(2012\)](#) dan [Sharafutdinova & Lokshin \(2020\)](#) menekankan bahwa penggunaan fasilitas *financial secrecy* sangat tinggi di negara dengan sistem keuangan yang tidak transparan, akuntabel serta kelembagaan pemerintah yang lemah.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil *robustness test* yang memberikan penekanan berbeda pada kondisi ekonomi suatu negara khususnya negara maju dan negara berkembang. *Financial secrecy* berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi di negara maju. Hal ini menjelaskan bahwa negara-negara maju dengan kondisi ekonomi yang stabil, sistem hukum yang adil, dan sistem kelembagaan yang dipandang bersih dan transparan ternyata memiliki sistem kerahasiaan keuangan yang membantu individu dan entitas untuk menyembunyikan aset yang diperoleh secara ilegal. Sistem *financial secrecy* di negara-negara maju ini menjadi celah terjadinya aktivitas korupsi karena setiap pengungkapan data nasabah dianggap sebagai tindak pidana. [Binhadab et al. \(2022\)](#) juga menambahkan bahwa *financial secrecy* di negara-negara maju dimanfaatkan oleh individu dan entitas yang melakukan aktivitas ekonomi dan politik di negara berkembang.

Para elit politik di negara dengan kondisi politik yang tidak stabil melakukan transfer dana dan penyimpanan kekayaan mereka ke negara dengan tingkat *financial secrecy* yang tinggi sebelum dilakukannya pemilu atau kudeta untuk menghindari adanya tekanan politik yang dapat menyebabkan pemindatanganan atau pengalihan kekayaan tersebut. Sementara itu, dalam konteks bisnis, para pelaku usaha di negara berkembang menghadapi kondisi bisnis yang tidak stabil, kurangnya hak kepemilikan yang terjamin dan tidak adanya pengadilan yang independen untuk menyelesaikan perselisihan bisnis. Hal ini berdampak pada aktivitas ekonomi dan investasi bisnis mereka sehingga para pemilik usaha cenderung mencari opsi lain yang memungkinkan untuk mengamankan kekayaan mereka. Pengaruh *financial secrecy* terhadap korupsi memberikan penekanan yang berbeda di negara berkembang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat *financial secrecy* negara berkembang maka semakin tinggi tingkat korupsi dan sebaliknya. Hasil ini menunjukkan adanya kondisi bahwa *financial secrecy* di negara berkembang tidak memberikan dampak terhadap peningkatan korupsi yang signifikan. Negara-negara berkembang memang memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi. Akan tetapi, aset dan kekayaan yang diperoleh dari aktivitas korupsi tersebut tidak disimpan di negara mereka melainkan ditransfer ke negara lain dengan menggunakan rekening anonim atau *shell company* yang didukung oleh fasilitas *financial secrecy* di negara tersebut.

Pengaruh *financial secrecy* terhadap korupsi dapat diminimalisir ketika suatu negara memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi. Hasil *robustness test* menunjukkan *financial secrecy* tidak berpengaruh terhadap korupsi di kategori negara G20. Penelitian [Jansky et al. \(2018\)](#) dan, [Scarfone & Kerr \(2018\)](#) menyatakan bahwa akibat dari adanya penerapan kebijakan G20 terkait pertukaran informasi untuk meminimalkan penggelapan pajak menyebabkan dana yang diperoleh dari

setiap aktivitas ilegal dipindahkan ke negara-negara yang tidak menjadi bagian dari G20. Penelitian [Johannesen & Zucman \(2014\)](#) juga menunjukkan bahwa kebijakan G20 mengenai pertukaran informasi berdampak negatif terhadap tingkat *financial secrecy* khususnya yang diterapkan di Bank. Negara-negara yang patuh terhadap perjanjian bilateral ini kehilangan sejumlah klien yang sebelumnya melakukan penyimpanan dana dan kekayaan mereka di negara tersebut. Selain itu, [Martini & Murphy \(2018\)](#) menjelaskan bahwa negara G20 memiliki perjanjian yang berkaitan dengan penerapan *Beneficial Ownership Transparency* yang mendorong identifikasi, pengumpulan dan pelaporan identitas beneficial owner kepada pihak berwenang untuk mencegah penyalagunaan sistem keuangan dan sebagai upaya menghentikan korupsi lintas negara. Disamping itu, hasil *robustness test* juga menunjukkan bahwa *financial secrecy* berpengaruh positif terhadap korupsi di negara di kelompok negara Non G20. Negara-negara yang tidak memiliki perjanjian bilateral terkait pertukaran informasi ini cenderung memiliki sistem hukum yang memfasilitasi penyembunyian aset yang diperoleh melalui korupsi dalam bentuk suap maupun penggelapan dana publik. Hasil ini sejalan dengan pandangan [Martini & Murphy \(2018\)](#) yang mengatakan bahwa kasus korupsi besar lintas negara memerlukan kombinasi perusahaan dan rekening bank anonim sebagai media untuk melindungi aset yang diperoleh.

KESIMPULAN

Hasil pengujian dan analisis data dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa *financial secrecy* berpengaruh positif terhadap korupsi suatu negara. Penyediaan fasilitas kerahasiaan keuangan yang didukung dengan sistem hukum untuk melindungi informasi kepemilikan aset individu maupun entitas yang diperoleh secara ilegal menyebabkan korupsi yang dilakukan di negara tersebut semakin tinggi. Faktor *financial secrecy* ini menyebabkan terjadinya kesulitan

dalam proses penyidikan berbagai kasus kriminal keuangan. Pengujian *robustness* pada level negara maju dan negara berkembang juga menunjukkan bahwa *financial secrecy* berpengaruh positif terhadap korupsi di negara maju dan berpengaruh negatif di negara berkembang. Hasil ini memberikan bukti empiris bahwa negara-negara maju yang dianggap bersih dan bebas dari korupsi umumnya menyediakan fasilitas *financial secrecy* untuk melindungi informasi keuangan klien yang berdampak pada meningkatnya korupsi di negara-negara tersebut. Sedangkan *financial secrecy* tidak memiliki dampak pada peningkatan korupsi negara berkembang karena aset yang diperoleh dari korupsi dalam bentuk suap, pencucian uang maupun penggelapan dana publik diahlikan ke negara-negara lain yang menyediakan fasilitas *financial secrecy* dan tidak disimpan di negara mereka.

Hasil *robustness test* juga menunjukkan bahwa pengaruh dari *financial secrecy* terhadap korupsi dapat diminimalkan apabila negara memiliki komitmen mengenai pertukaran informasi keuangan untuk memberantas korupsi seperti yang dilakukan di negara-negara G20 yang ditunjukkan dengan tidak adanya pengaruh *financial secrecy* terhadap korupsi di kategori negara G20 tetapi berpengaruh positif di kategori negara non G20. Hasil ini

membuktikan bahwa bahwa negara-negara non G20 cenderung lebih agresif dalam memanfaatkan fasilitas *financial secrecy* untuk melakukan korupsi karena tidak adanya regulasi yang mengatur pengungkapan atau pertukaran informasi keuangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pengukuran korupsi menggunakan *score CPI* hanya berfokus pada persepsi korupsi sektor publik yang dinilai oleh para ekonom dan expert dari berbagai organisasi. Akan tetapi, korupsi dengan memanfaatkan fasilitas *financial secrecy* juga dilakukan oleh sektor swasta dalam pelaksanaan bisnis melalui pembuatan *shell company* maupun penggunaan rekening dengan identitas yang disamarkan. Selain itu, sebagian besar negara yang masuk dalam penilaian *CPI* oleh *Transparency International* tidak masuk dalam penilaian *FSI* oleh *Tax Justice Network* sehingga data *CPI* dari negara-negara tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji aktivitas korupsi yang tidak hanya dilakukan oleh sektor publik tetapi juga oleh sektor swasta dan menambahkan variabel lain seperti akuntabilitas dan transparansi yang diindikasikan dapat mengontrol korupsi suatu negara.

REFERENCES

- Binhadab, N., Gillanders, R., & McCluskey, T. (2022). A Clean and Discreet Service: The Role of Corruption and Secrecy in Profit Shifting by Multinational Firms. *SSRN*, 1–43.
- Carr, I., & Jago, R. (2014). Corruption, Money Laundering, Secrecy and Societal Responsibility of Banks. *SSRN*, 1–19. <http://ssrn.com/abstract=2454934>
- Christensen, J. (2012). The hidden trillions: Secrecy, corruption, and the offshore interface. *Crime, Law and Social Change*, 57(3), 325–343. <https://doi.org/10.1007/s10611-011-9347-9>
- Cobham, A., Jansky, P., & Meinzer, M. (2015). The Financial Secrecy Index: Shedding New Light on the Geography of Secrecy. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2623152>
- Diagana, O., & Diagne, M. (2023, June 13). *Corruption is a Global Problem for Development. To Fight It, We All Have a Role to Play*. The World Bank.
- Hofmann, A. (2018). *Bank Secrecy Laws (Switzerland)*. Practical Law TM.
- Jansky, P., Meinzer, M., & Palansky, M. (2018). Is Panama really your tax haven? Secrecy jurisdictions and the countries they harm. *SSRN Electronic Journal*, 23, 1–36. <http://ies.fsv.cuni.cz>

- Janský, P., Palanský, M., & Wójcik, D. (2023). Shallow and Uneven Progress towards Global Financial Transparency: Evidence from the Financial Secrecy Index. *Geoforum*, 141, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103728>
- Johannesen, N., & Zucman, G. (2014). The end of bank secrecy? An evaluation of the G20 tax haven crackdown. *American Economic Journal: Economic Policy*, 6(1 B), 65–91. <https://doi.org/10.1257/pol.6.1.65>
- Kuipers, S., & Verhey, V. (2023). How to deal with corruption if you want your economy to grow. *Emerald Open Research*, 1(13), 1–4. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EOR-13-2023-0024/full/html>
- Lord, N., & Levi, M. (2017). Organizing the finances for and the finances from transnational corporate bribery. *European Journal of Criminology*, 14(3), 365–365.
- Maguchu, P. S. (2018). The law is just the law: analysing the definition of corruption in Zimbabwe. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 354–361. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2017-0055>
- Martini, M., & Murphy, M. (2018). *G20 Leaders or LaGGards? Reviewing G20 promises on ending anonymous companies*. www.transparency.org
- Nurjanah, S., & Andri. (2015). Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Journal of Judicial Review*, XVII(2), 59–74.
- Scarfone, J., & Kerr, M. (2018). Liberated Arts: A Journal for Undergraduate Research Paved Paradise: Analysis of the Common Reporting Standard to Combat Tax Avoidance. *Liberated Arts: A Journal for Undergraduate Research*, 4(1), 1–12. <https://ojs.lib.uwo.ca/index.php/lajur>
- Sharafutdinova, G., & Lokshin, M. (2020). Hide and Protect A Role of Global Financial Secrecy in Shaping Domestic Institutions. *Policy Research Working Paper*, 1–27. <http://www.worldbank.org/prwp>.
- Sukmadilaga, C., Abubakar, L., Handayani, T., Ghani, E. K., & Lestari, T. U. (2020). The Influence of Internet on Financial Reporting Practices, Financial Secrecy and Firm Value of ASEAN Companies. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(2), 371–381. www.ijicc.net
- Tax Justice Network. (2020, November 14). *Financial secrecy*. <https://Taxjustice.Net/>.
- Tax Justice Network. (2024). *What is financial secrecy?* <https://Taxjustice.Net/>.
- The World Bank. (2020, February 19). *Anticorruption Fact Sheet*. <https://www.worldbank.org/>.
- Trabelsi, M. A., & Trabelsi, H. (2021). At what level of corruption does economic growth decrease? *Journal of Financial Crime*, 28(4), 1317–1324. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2019-0171>
- Transparency Internasional. (2024). *What is corruption ?* <https://www.transparency.org/>.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perception Index*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.
- Upadhyay, A. (2024). Financial opacity and financial secrecy: lessons for Nepal. *Journal of Money Laundering Control*, 27(2), 383–394. <https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2023-0049>
- Yu, S. (2019). Can banks still keep a secret? : bank secrecy in financial centres around the world. *IALS Student Law Review*, 6(1), 1–25.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan